

PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM MENINGKATKAN KELULUSAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BELU

Charlos Junior Rebong B.L Paha¹, Nursalam², Rowland A. Benyamin³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: lamapahajunior@gmail.com¹, rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id²,

Nursalam@gmail.com³

ABSTRACT

Non-formal education, particularly through Community Learning Centers (PKBM), plays a strategic role in improving graduation rates among school dropouts in Belu Regency. PKBM provides equivalency education through packages A, B, and C, as well as skills programs for communities unable to access formal education. This study aims to analyze the role of PKBM in reducing dropout rates and improving student graduation. Through a qualitative approach and case study in two PKBMs, namely PKBM Deflobamora Atambua (urban) and PKBM Brithany Cendana Timur (rural), it was found that PKBM employs holistic, integrative, and flexible strategies tailored to the needs of students, both in terms of curriculum and learning time. Collaboration between PKBM, local government, and communities also plays a key role in the success of the program. However, PKBM still faces challenges such as limited human resources, funding, and facilities. Nevertheless, PKBM has achieved a high graduation rate (90-100%) in recent years, especially in package C, with a learning approach based on practice and technology. This study recommends strengthening PKBM capacity and expanding service coverage to rural areas.

Keywords : Non-formal Education, PKBM, School Dropouts, Equivalency Education, Belu Regency

ABSTRAK

Pendidikan nonformal, khususnya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), memiliki peran strategis dalam meningkatkan kelulusan anak putus sekolah di Kabupaten Belu. PKBM menyediakan pendidikan kesetaraan melalui paket A, B, dan C serta program keterampilan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PKBM dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kelulusan peserta didik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di dua PKBM, yaitu PKBM Deflobamora Atambua (perkotaan) dan PKBM Brithany Cendana Timur (pedesaan), ditemukan bahwa PKBM memiliki strategi holistik, integratif, dan fleksibel yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik, baik dari segi kurikulum maupun waktu belajar. Kolaborasi antara PKBM, pemerintah daerah, dan masyarakat juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan program ini. Namun, PKBM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas. Walaupun demikian, PKBM berhasil mencapai tingkat kelulusan yang tinggi (90-100%)

dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada paket C, dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya memperkuat kapasitas PKBM dan memperluas jangkauan layanan ke wilayah pedesaan.

Kata Kunci : Pendidikan Nonformal, PKBM, Anak Putus Sekolah, Pendidikan Kesetaraan, Kabupaten Belu

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pengajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang berlangsung sepanjang hayat, baik melalui pembelajaran formal di sekolah maupun secara mandiri. Pendidikan berfungsi menuntun manusia keluar dari ketidaktahuan menuju pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kondisi pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Lemahnya manajemen pendidikan, kesenjangan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas tenaga pendidik, kurangnya dukungan pemerintah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional, serta minimnya evaluasi pembelajaran menjadi faktor yang memperburuk kualitas pendidikan nasional (Agung, 2021:3). Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal, dan nonformal, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nonformal hadir sebagai jalur alternatif yang fleksibel, berjenjang, dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal (Sudjana, 2004:39).

Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan strategis adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai satuan pendidikan, PKBM menyediakan layanan pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup masyarakat. PKBM bertugas melengkapi, mendukung, dan menjadi pengganti pendidikan formal bagi warga yang putus sekolah atau membutuhkan kesempatan belajar tambahan. PKBM berfungsi memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri melalui prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat” (Permendikbud, 2016). Melalui program-program seperti Paket A, B, dan C, PKBM membuka akses bagi warga untuk tetap

mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah formal, sekaligus mengembangkan potensi diri menuju kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik.

Di Kabupaten Belu, keberadaan PKBM sangat penting mengingat tingginya angka anak putus sekolah. Peneliti memilih dua PKBM sebagai lokasi penelitian, yaitu PKBM Deflobamora Atambua yang berada di wilayah perkotaan dan PKBM Brithany Cendana Timur yang berada di pedesaan. Keduanya mewakili 13 PKBM yang beroperasi di Kabupaten Belu. Data menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah pada tahun 2022 sebanyak 4.087 orang, meningkat tajam menjadi 8.517 orang pada tahun 2023. Angka tersebut tersebar di 12 kecamatan dengan total 69 desa dan 12 kelurahan. Kecamatan Tasifeto Timur menjadi wilayah dengan jumlah putus sekolah tertinggi, yaitu 1.410 anak, disusul Kecamatan Lamaknen dengan 1.301 anak. Data ini menggambarkan bahwa wilayah pedesaan lebih rentan terhadap kasus putus sekolah jika dibandingkan dengan perkotaan, karena keterbatasan akses pendidikan, kondisi ekonomi, dan faktor sosial-budaya masyarakat.

Dalam konteks ini, PKBM memegang peran krusial sebagai lembaga yang mampu menjangkau anak-anak dan orang dewasa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Program Paket A, B, dan C di PKBM memungkinkan peserta didik memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA yang dapat digunakan untuk melanjutkan studi ataupun memasuki dunia kerja. Selain memberikan kompetensi akademik minimal, pendidikan kesetaraan juga membekali peserta dengan kecakapan hidup sehingga mereka mampu beradaptasi dan mandiri. Sasaran pendidikan kesetaraan adalah warga yang tidak dapat bersekolah karena kendala ekonomi, waktu, geografis, keyakinan, maupun masalah sosial atau hukum. Waktu belajar di PKBM lebih fleksibel, hanya 1–2 kali per minggu selama 2–3 jam, sehingga peserta didik dapat tetap bekerja atau mengurus keluarga. PKBM juga menerapkan ANBK bagi peserta didik, yaitu asesmen yang menjadi indikator standar penilaian nasional.

Proses pendaftaran peserta didik putus sekolah di PKBM relatif sederhana, yaitu menyerahkan fotokopi rapor dan kartu keluarga, mengisi formulir, membayar

biaya pendaftaran, serta membuat surat pernyataan untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal yang disepakati. Lulusan Paket A, B, dan C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan lulusan sekolah formal. Mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau menggunakan ijazah untuk keperluan pekerjaan. Hal ini membuat pendidikan kesetaraan menjadi pilihan yang semakin diminati. Peserta didik PKBM bukan hanya anak putus sekolah tetapi juga atlet, seniman, pekerja, hingga orang dewasa yang membutuhkan ijazah untuk peningkatan karier. PKBM turut difasilitasi oleh lembaga lain seperti SKB, organisasi masyarakat, dan kelompok belajar di lingkungan warga, sehingga cakupan layanan pendidikan nonformal semakin luas.

Melihat tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Belu, maka PKBM memiliki peran penting sebagai solusi untuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. PKBM harus memperkuat sosialisasi dan memperluas jangkauan layanan terutama ke wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Peneliti menyadari bahwa anak putus sekolah tidak hanya berasal dari kelompok usia sekolah (7–21 tahun) tetapi juga dari usia di atas 21 tahun. Oleh karena itu, PKBM perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif, mudah diakses, dan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu bagaimana peran PKBM dalam meningkatkan kelulusan anak putus sekolah di Kabupaten Belu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran PKBM dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kelulusan peserta didik di wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana program PKBM berperan dalam mengatasi masalah anak putus sekolah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi gejala secara alamiah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sesuai pandangan Creswell dan Yin yang menyebutkan bahwa studi kasus efektif ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan ketika peneliti membutuhkan berbagai sumber informasi. Lokasi penelitian berada di dua PKBM, yaitu PKBM

Deflobamora Atambua sebagai representasi wilayah perkotaan dan PKBM Brithany Cendana Timur sebagai representasi wilayah pedesaan. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: peran PKBM sebagai pelaku utama, kolaborasi dengan pihak lain, dan penyediaan fasilitas serta akses informasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen dari PKBM dan Dinas Pendidikan. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, melibatkan direktur PKBM, peserta didik, tutor, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang PNF.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan untuk melihat langsung kegiatan pembelajaran dan program PKBM, wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam sesuai fokus penelitian, serta dokumentasi sebagai pelengkap data. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan sejak data mulai terkumpul hingga mencapai kejenuhan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui proses ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas peran PKBM dalam meningkatkan kelulusan anak putus sekolah di Kabupaten Belu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi PKBM untuk Mengajak Anak Putus Sekolah Kembali ke Sekolah

Strategi PKBM dalam mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan haruslah holistik, integratif, dan berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendaftar, tetapi oleh kemampuan PKBM dalam memahami akar masalah, menawarkan solusi yang fleksibel, dan memastikan peserta didik meraih ijazah serta siap untuk langkah lanjutnya, baik bekerja maupun melanjutkan pendidikan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bukan lagi sekadar lembaga pendidikan alternatif, melainkan sebuah strategi nasional untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, dan membangun modal

masyarakat Indonesia yang berdaya saing. PKBM memiliki kemampuan untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal seperti anak putus sekolah, pekerja, kaum disabilitas, dan masyarakat yang ada di daerah terpencil.

1. PKBM Deflobamora Atambua

Sosialisasi gerakan mengajak anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan. Pendekatan pelayanan pembelajaran dilakukan dengan membuka titik-titik belajar di setiap desa atau kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dijelaskan bahwa pada tahun ajaran 2024–2025 PKBM Deflobamora Atambua memiliki empat titik belajar, yaitu:

- 1) titik belajar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Atambua, yang melayani warga binaan yang belum menamatkan pendidikan setingkat SMA;
- 2) titik belajar Raimanuk yang berlokasi di Kecamatan Raimanuk;
- 3) titik belajar Dualaus di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
- 4) titik belajar Motabuik di Kecamatan Atambua Selatan.

Berikut merupakan foto empat titik belajar PKBM Deflobamora Atambua tersebut.

2. PKBM Brithany Cendana Timur

Upaya penanganan Anak Putus Sekolah di PKBM Brithany Cendana Timur dilakukan melalui dua langkah utama, yaitu melakukan sosialisasi gerakan “Mengajak Anak Putus Sekolah Kembali ke Sekolah” yang dilaksanakan di tingkat desa, serta menyediakan layanan pembelajaran dengan membuka titik-titik belajar di setiap desa atau kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Brithany Cendana Timur, Bapak Leomingus Seran, pada tahun ajaran 2024–2025 PKBM Brithany Cendana Timur memiliki dua titik belajar, yakni titik belajar di Sekretariat PKBM Brithany Cendana Timur yang berlokasi di Dusun Motaoe, Desa Lametlek, Kecamatan Tasifeto Timur, serta titik belajar di Dusun Raimenat, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen.

Strategi PKBM dalam Peningkatan Kelulusan Peserta Didik

PKBM memainkan peran krusial dalam menyelenggarakan pendidikan

kesetaraan Paket A, B, dan C serta berbagai program keterampilan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah tingginya angka anak putus sekolah (drop out) dan rendahnya persentase kelulusan. Hal ini sering kali disebabkan oleh karakteristik warga belajar yang heterogen, dengan berbagai tekanan ekonomi, sosial, dan waktu belajar yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, personal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan angka kelulusan.

Berikut strategi PKBM Deflobamora Atambua dan PKBM Brithany Cendana Timur dalam peningkatan kelulusan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Belu.

1. PKBM Deflobamora Atambua

Standar kelulusan peserta didik PKBM Deflobamora Atambua mencakup kemampuan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitar; menunjukkan sikap percaya diri; mencari dan menerapkan informasi dari berbagai sumber secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif; belajar secara mandiri sesuai potensi; serta memiliki kemampuan berwirausaha melalui peningkatan keterampilan dari kursus dan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dijelaskan bahwa untuk mencapai standar tersebut PKBM menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel dengan jadwal yang disesuaikan dengan aktivitas peserta didik melalui strategi belajar sambil bekerja. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi tutorial tatap muka yang berfokus pada materi esensial untuk ujian kesetaraan sebanyak dua kali seminggu, pendampingan individual bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar termasuk kunjungan tutor ke rumah, pemanfaatan media sosial untuk penyampaian informasi dan modul digital, serta pembelajaran yang terdiri dari 80% praktik untuk peningkatan keterampilan dan 20% teori.

2. PKBM Brithany Cendana Timur

Standar kelulusan peserta didik PKBM Brithany Cendana Timur meliputi pemenuhan persyaratan administrasi berupa kepemilikan dokumen pendukung yang valid seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan ijazah sebelumnya, serta memastikan peserta didik telah terdaftar dalam Dapodik (Data

Pokok Pendidikan); mengikuti ujian kesetaraan nasional sesuai ketentuan; menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM; serta menunjukkan sikap menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

Kendala yang Dihadapi PKBM

PKBM memainkan peran krusial dalam sistem pendidikan nasional dengan menyediakan layanan pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Namun, dalam menjalankan fungsinya, PKBM menghadapi banyak tantangan multidimensi seperti kendala pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Sebagian besar PKBM menggantungkan operasionalnya pada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pencairan dana ini seringkali lambat dan birokratis, mengganggu kelancaran kegiatan. Hal ini adalah akar masalah dari banyak permasalahan lain yang dihadapi PKBM.

Banyak tutor di PKBM adalah tenaga sukarela atau paruh waktu dengan latar belakang pendidikan yang tidak selalu sesuai. Mereka seringkali tidak memiliki kompetensi pedagogik yang memadai untuk menghadapi peserta didik.

Untuk tempat belajar, sebagian besar PKBM tidak memiliki gedung sendiri. Mereka meminjam balai warga, gedung sekolah formal (SD, SMP, SMA/SMK) untuk melakukan aktivitas belajar dan ujian mereka. Tidak hanya itu, keterbatasan alat dan bahan ajar juga menjadi penghambat, seperti kekurangan komputer dan internet yang tidak memadai sehingga menyulitkan peserta didik.

1. PKBM Deflobamora Atambua

PKBM Deflobamora Atambua menghadapi serangkaian kendala multidimensi yang saling berkaitan. Kendala-kendala ini bukan hanya bersifat operasional tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan struktural, yang merupakan gambaran umum dari tantangan pendidikan nonformal di daerah tertinggal dan terdepan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dan Kepala Sekolah PKBM Brithany Cendana Timur, keduanya sepakat bahwa kendala utama yang dihadapi PKBM

meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kurangnya tutor yang berkualitas serta kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan pendidik yang kompeten dan berkomitmen tinggi, terutama pada mata pelajaran spesifik atau keterampilan vokasional. Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan karena PKBM sangat bergantung pada Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah yang jumlahnya terbatas dan proses pencairannya sering terlambat. Kendala lain mencakup jauhnya jarak antara rumah peserta didik dan lokasi belajar, terutama bagi mereka yang berasal dari desa-desa terpencil dengan akses transportasi yang sulit. Mayoritas peserta didik juga berasal dari keluarga ekonomi lemah dengan tingkat pendidikan dasar yang rendah, sehingga mereka harus bekerja sebagai petani atau buruh untuk membantu keluarga, yang menyebabkan waktu belajar terbatas dan meningkatkan risiko putus sekolah. Selain itu, rendahnya tingkat literasi dasar (baca, tulis, dan hitung) pada peserta didik dewasa masih menjadi tantangan signifikan, ditambah faktor sosial budaya berupa persepsi masyarakat yang cenderung menganggap pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C kurang bergengsi dibandingkan pendidikan formal, meskipun standar pembelajaran, pelatihan keterampilan, serta program-program pendukung di PKBM sebenarnya telah setara dengan sekolah formal.

Kendala yang dihadapi PKBM Deflobamora Atambua merupakan sebuah lingkaran setan yang saling memengaruhi. Keterbatasan dana menyebabkan kualitas SDM rendah, yang berakibat pada layanan yang terbatas. Layanan yang terbatas kemudian memperkuat stigma negatif masyarakat, sementara kondisi geografis dan demografis yang sulit memperburuk semua kondisi tersebut. Untuk memutus siklus ini, diperlukan strategi yang terintegrasi, tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga melalui kemitraan, sosialisasi yang gencar untuk mengubah persepsi, dan inovasi model pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor atau pengajar PKBM Deflobamora Atambua, Dessy Kapitan menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi peserta didik adalah lemahnya daya tangkap terhadap materi pembelajaran, terutama karena banyak di antara mereka berusia dewasa atau lanjut usia dan telah lama tidak bersekolah. Untuk mengatasinya tutor lebih sering menerapkan sistem pembelajaran

berbasis praktik atau sekolah lapangan.

2. PKBM Brithany Cendana Timur

PKBM Brithany Cendana Timur berlokasi di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Lokasi PKBM Brithany Cendana Timur yang jauh dari pusat Kota Atambua membuat tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman enggan untuk mengajar di sana. Mereka cenderung memilih mengajar di lembaga-lembaga yang mudah diakses.

Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan sering kali harus bekerja membantu orang tua (sebagai petani, buruh, dll.) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat pendidikan menjadi prioritas sekunder. Waktu belajar mereka sangat terbatas dan risiko untuk putus sekolah (drop out) sangat tinggi. Sebagai daerah pedesaan, akses jalan menuju Desa Manleten tidaklah mudah. Jalan mungkin belum diaspal dengan baik, angkutan umum sangat terbatas, dan biaya transportasi menjadi mahal bagi keluarga dengan ekonomi lemah.

Hasil dan Analisis Peran PKBM dalam Meningkatkan Kelulusan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Belu

Kabupaten Belu, yang terletak di ujung Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang unik. Wilayah dengan topografi berbukit-bukit dan akses transportasi yang terbatas ini menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan tenaga kerja anak untuk membantu keluarga, serta dalam beberapa kasus praktik budaya seperti pernikahan dini, berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Anak-anak yang putus sekolah tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, tetapi juga berisiko tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, eksploitasi, dan kemiskinan siklus. Dalam konteks inilah kehadiran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi sebuah keniscayaan. PKBM hadir sebagai lembaga pendidikan alternatif yang fleksibel, dirancang khusus untuk menjangkau, menarik kembali, dan meluluskan anak-anak putus sekolah sehingga mereka dapat memiliki kesempatan kedua untuk

meraih masa depan.

Peran PKBM dalam peningkatan kelulusan yaitu menyiapkan fasilitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar sehingga warga belajar di PKBM bisa tuntas dalam pembelajaran, baik dari segi ilmu maupun keterampilan yang pada akhirnya mendapatkan ijazah sesuai dengan jenjang yang mereka ikuti yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C.

PKBM Sebagai Aktor Utama

Sebagai pelaku utama, PKBM menjalankan peran aktif sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto (2002) yang menyatakan bahwa peran aktif ditunjukkan sesuai dengan kontribusi nyata dan kehadiran dalam organisasi. PKBM sebagai pelaku utama dalam menyelenggarakan berbagai program pembelajaran bagi masyarakat terutama yang tidak terjangkau di pendidikan formal atau sempat di pendidikan formal namun belum menyelesaikan sampai selesai pendidikan formalnya, PKBM juga sebagai tombak pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan hidup atau (life skill).

Sebagai pelaku utama dalam penanganan anak putus sekolah, PKBM memikul tanggung jawab strategis untuk tidak hanya menyediakan akses pendidikan melalui program kesetaraan paket A, B, dan C tetapi juga merancang pelaksanaan program pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan terintegrasi dengan pelatihan keterampilan vokasional yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga mampu memberdayakan peserta didik secara akademis maupun ekonomi untuk menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua dan PKBM Brithany Cendana Timur, Bapak Gaspar Kopong Kelen dan Bapak Leomingus Seran, keduanya mengatakan:

“Lebih berfokus mengajak warga yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah mulai dari tingkat paling bawah yaitu RT/RW.”

Anak putus sekolah di Kabupaten Belu umumnya menghadapi tantangan multidimensi seperti faktor ekonomi, geografis, sosial budaya, dan akademik. PKBM perlu merancang strategi pembelajaran yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual untuk menjawab tantangan anak putus sekolah.

Hal ini merupakan implementasi dari karakter PKBM yang fleksibel. Menurut Sihombing (2001), PKBM adalah tempat pusaran berbagai informasi yang handal bagi perkembangan masyarakat, dan PKBM bisa menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Ini sesuai dengan konsep pelaksanaan peran dari Sutarto (2009), di mana PKBM menyesuaikan perilaku dengan segala situasi peserta didik. Berikut strategi pembelajaran PKBM.

Strategi pembelajaran yang diterapkan PKBM 20% tatap muka dengan belajar di lapangan yaitu belajar sambil bekerja, dengan harapan selesai belajar peserta didik bisa memanen hasil dari kerja sambil belajar. Pembelajaran tatap muka juga melakukan diskusi dan simulasi untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.

PKBM menyediakan modul cetak yang dirancang mandiri sehingga warga belajar bisa belajar di rumah tanpa tergantung jadwal. Tatap muka 80% belajar mandiri, di mana peserta didik diberi modul untuk belajar sendiri di rumah. Modul dilengkapi soal latihan dan kunci jawaban.

PKBM Deflobamora dan PKBM Brithany Cendana Timur menyediakan program kesetaraan Paket A, B, dan C serta program keterampilan seperti mengelas dan komputer. Ini adalah wujud dari fungsi PKBM sebagai pemberi layanan pendidikan nonformal (Sudjana, 2004) dan peran aktif PKBM dalam mengatasi masalah putus sekolah. PKBM menyusun program untuk anak putus sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif, fleksibel, dan penuh empati. Program ini harus menjawab akar masalah sekaligus memberikan solusi praktis untuk masa depan mereka. Program yang dilakukan PKBM khusus anak putus sekolah yaitu:

Penyusunan kurikulum di PKBM yang mengadopsi Kurikulum Merdeka untuk pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C namun diperkaya dengan muatan lokal dan vokasional. Untuk modul pembelajarannya, modul dibuat yang ringkas, aplikatif, dan mudah dipahami dengan bahasa yang santai dan banyak ilustrasi.

Program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C adalah bukti nyata komitmen negara untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagai program utama dengan metode pembelajaran Blended Learning yaitu kombinasi tatap muka

dan pembelajaran daring melalui platform sederhana seperti WhatsApp Group dan Google Classroom untuk memberikan tugas dan materi. Berikut masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan:

- a) Paket A (SD): Sasaran anak putus sekolah di tingkat SD atau belum pernah menyelesaikan pendidikan dasar, dan fokusnya melek huruf dengan mengajarkan cara berhitung, menulis, dan membaca.
- b) Paket B (SMP): Untuk anak putus sekolah di tingkat SMP atau lulus SD/Paket A tetapi tidak melanjutkan ke SMA. Fokus PKBM yaitu penguatan dasar-dasar ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan keterampilan sosial.
- c) Paket C (SMA/SMK): Untuk anak putus sekolah di tingkat SMA atau lulus SMP/Paket B ingin mendapatkan ijazah setara SMA. Fokus PKBM yaitu mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi atau dunia kerja, serta keterampilan vokasional yang lebih spesifik dan mendalam.

Pendekatan tutor yang egaliter dan pendampingan individu mencerminkan komponen pelaksanaan peran. Dalam teori Sutarto (2009), perilaku tutor disesuaikan dengan kebutuhan posisi pendamping. Mustofa Kamil (2009) juga menyatakan bahwa tutor PKBM harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang tidak menakutkan.

PKBM melalui para pengajarnya memiliki pendekatan yang berbeda dengan guru di sekolah formal. PKBM menerapkan pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman hidup peserta didik serta menggunakan materi kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang praktis.

PKBM juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak menakutkan tanpa tekanan. Berperan sebagai teman belajar yang egaliter, bukan sebagai figur otoritas yang menakutkan dan membangun dialog dua arah dalam proses pembelajaran.

PKBM memberikan dukungan yang holistik melampaui aspek akademik yaitu dengan membangun kepercayaan diri peserta didik yang mungkin trauma dengan pengalaman sekolah sebelumnya. PKBM juga memberikan motivasi dan semangat

untuk terus belajar serta membantu mengatasi masalah pribadi yang menghambat proses belajar.

PKBM membantu peserta didik menemukan minat dan bakat mereka dan juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan.

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen kritis dalam penyelenggaraan pendidikan di PKBM. Berbeda dengan pendidikan formal, evaluasi di PKBM harus lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik yang sering kali memiliki latar belakang putus sekolah dan kebutuhan khusus.

PKBM melakukan evaluasi formatif dan sumatif, termasuk ujian kesetaraan nasional. Ini adalah bagian dari tanggung jawab PKBM sebagai penyelenggara pendidikan untuk memastikan pencapaian kompetensi peserta didik, sebagaimana dimaksud dalam fungsi PKBM menurut Sudjana (2004). Evaluasi pembelajaran di PKBM berpusat pada peserta didik (warga belajar), di mana penilaian disesuaikan dengan latar belakang, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing individu. PKBM menerapkan kombinasi dari berbagai jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif yang bertujuan memantau kemajuan belajar selama proses berlangsung dan evaluasi sumatif yang bertujuan mengukur pencapaian kompetensi secara keseluruhan pada akhir satu unit program atau semester.

Tujuan dari evaluasi yang dilakukan PKBM adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk memetakan kebutuhan belajar mereka. Agar efektif, evaluasi di PKBM harus memegang prinsip fleksibel yaitu dapat disesuaikan dengan waktu, kondisi, lokasi, dan peserta didik. PKBM menggunakan beragam metode evaluasi untuk mendapatkan gambaran utuh, sering dikenal sebagai penilaian portofolio atau assessment holistik.

Evaluasi untuk ujian kesetaraan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) Kemendikbudristek, namun prosesnya diisi dengan evaluasi kebijakan seperti ujian kesetaraan nasional yang dilaksanakan secara nasional untuk menentukan kelulusan dan pemberian ijazah.

Peran PKBM Melibatkan Berbagai Pihak

Peran ini sejalan dengan Teori Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2002) tentang peran signifikan yang memerlukan interaksi langsung dengan orang lain dan

memiliki makna yang penting bagi individu. PKBM di Kabupaten Belu tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan peserta didik. Keterlibatan multipihak ini menjadi kunci dalam meningkatkan kelulusan anak putus sekolah di Kabupaten Belu. PKBM melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah (Dinas Pendidikan) yang memberikan pengawasan dan bimbingan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran yang berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, serta tutor/instruktur yang menyediakan materi dan memfasilitasi pembelajaran.

Sosialisasi kepada masyarakat adalah sebuah proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi dalam hal ini PKBM kepada seluruh lapisan komunitas di suatu wilayah dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat atau stigma negatif bahwa pendidikan nonformal lebih rendah daripada pendidikan formal serta membangun sikap positif. Hal ini merupakan bentuk interaksi dan pemenuhan harapan peran dari masyarakat (Sutarto, 2009) agar PKBM aktif menjangkau peserta didik.

Tujuan khusus sosialisasi PKBM kepada masyarakat yaitu memberitahu masyarakat bahwa di daerah mereka terdapat lembaga yang menyelenggarakan program Paket A, B, C dan kursus keterampilan, serta menemukan dan mendekati anak putus sekolah, remaja yang tidak bersekolah, atau orang dewasa yang membutuhkan kejar paket.

Oleh karena itu PKBM meyakinkan keluarga dan orang tua tentang pentingnya menyekolahkan kembali anak mereka atau pentingnya pendidikan bagi orang dewasa, serta membina hubungan dengan masyarakat, kepala desa, dan organisasi lokal agar mereka menjadi corong dan mitra PKBM.

PKBM juga melakukan monitoring bersifat internal dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan dengan menggunakan teknik monitoring seperti observasi langsung, yaitu tutor mengamati warga belajar selama sesi pembelajaran dan praktik.

PKBM tidak bisa pasif menunggu peserta didik datang, mereka harus aktif menjemput bola, meyakinkan masyarakat, dan secara intensif mendampingi setiap

perkembangan warga belajar. Keberhasilan sebuah PKBM sangat ditentukan oleh seberapa efektif mereka menjalankan kedua fungsi ini.

Kolaborasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang masing-masing pihak miliki. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Lapas, dan dunia usaha menunjukkan peran PKBM sebagai fasilitator dan mitra dalam pembangunan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO dalam (Finola et al., n.d.) dan Sihombing (2001).

Kolaborasi ini adalah strategi untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran. Menurut Nursalam et al. (2001), dalam menyesuaikan diri dalam peran yang harus dilakukan adalah kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan peran serta keseimbangan antarsatu peran dengan peran lainnya sehingga semuanya harus berkesinambungan.

Kolaborasi PKBM dengan multipihak adalah kemitraan strategis antara PKBM dengan berbagai lembaga atau kelompok untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaksana. Kolaborasi memungkinkan PKBM menjangkau lebih banyak warga belajar, termasuk kelompok marjinal.

Berikut beberapa kolaborasi PKBM Deflobamora Atambua dan Brithany Cendana Timur dengan multipihak, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Belu

Dinas Pendidikan Kabupaten Belu memainkan peran strategis dalam mendukung pendidikan nonformal, yaitu PKBM. Dukungan ini mencakup monitoring kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi di PKBM yaitu ujian kesetaraan, monitoring penggunaan dana BOP dan fasilitas lainnya berjalan dengan efektif, serta Dinas Pendidikan juga memainkan peran penting untuk meningkatkan kelulusan anak putus sekolah. Kontribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Belu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nonformal,

Bapak Blasius Bria, S.Sos, dijelaskan bahwa peran PKBM sangat strategis dalam menyukseskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun karena PKBM menerima peserta didik tanpa membedakan batasan usia. Namun, terdapat catatan penting yang perlu diperhatikan, yakni perlunya PKBM melakukan perekrutan tenaga pendidik yang benar-benar fokus menangani pendidikan nonformal. Selama ini banyak tutor atau guru pendidikan formal yang turut membantu di PKBM, tetapi ke depan disarankan agar proses perekrutan lebih mengutamakan tutor dengan latar belakang pendidikan nonformal agar kualitas layanan semakin optimal.

a. Monitoring Kegiatan Pembelajaran

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Belu pada PKBM adalah monitoring yang mereka lakukan bukan untuk mengontrol secara ketat, tetapi memastikan standar mutu pendidikan nonformal tetap terjamin. Bentuk monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Belu adalah memastikan bahwa PKBM memiliki izin operasional yang sah dan masih berlaku. Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pembelajaran seperti kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

b. Monitoring Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dalam bentuk ujian kesetaraan Paket A, B, dan C merupakan puncak dari proses pembelajaran di PKBM. Keabsahan dan kredibilitas ijazah kesetaraan sangat bergantung pada integritas pelaksanaan ujian. Oleh karena itu, monitoring yang ketat dan sistematis dari Dinas Pendidikan menjadi kunci penjaminan mutu. Sebelum ujian dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Belu melakukan serangkaian monitoring untuk memastikan semua persiapan telah memenuhi syarat.

Dinas Pendidikan memverifikasi data calon peserta ujian yang diajukan oleh PKBM, seperti nama, usia, dan riwayat pendidikan. Ini untuk memastikan bahwa peserta memenuhi syarat mengikuti ujian pada jenjang tertentu. Dinas juga menetapkan lokasi ujian yang memenuhi syarat seperti memiliki ruangan yang memadai, kursi, meja, laptop, dan komputer.

c. Monitoring Pendanaan

Peran dinas yaitu memeriksa anggaran pembelajaran dari PKBM sesuai

dengan juknis penggunaan dana BOP. PKBM di Kabupaten Belu menerima BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan). Bantuan ini adalah bentuk dukungan yang paling umum. Dana BOP diberikan langsung kepada PKBM untuk membantu biaya operasional program pendidikan seperti biaya tutor, pembelian bahan ajar dan alat tulis kantor, biaya listrik, internet, komputer, laptop, proyektor dan administrasi, pembelian peralatan praktikum (untuk kejuruan). Untuk bantuan dari pemerintah sendiri biasanya berupa meja dan kursi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nonformal, Bapak Blasius Bria, S.Sos, dijelaskan bahwa dalam proses monitoring, pihak dinas melakukan kunjungan ke PKBM setiap tiga bulan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, terkait pendanaan khususnya NOP (Nomor Organisasi Pengelolaan), penyusunan rancangan anggaran BOP harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan sebelum disahkan dan dicairkan melalui bank, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dijelaskan bahwa besaran dana BOP yang diterima setiap tahun tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada jumlah peserta didik usia sekolah yang mendaftar di PKBM. Hal ini membuat pengelolaan anggaran harus dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta jumlah warga belajar yang dilayani.

1. Fasilitas

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Belu memastikan PKBM mempunyai sarana prasarana pendukung yaitu ruang kelas, komputer, laptop, kursi, meja dan lainnya untuk mendukung pembelajaran peserta didik.

2. Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam mendukung kegiatan PKBM baik sebagai peserta, penyedia sumber daya, maupun mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi ini menjadi kunci keberhasilan PKBM dalam memberdayakan masyarakat. PKBM tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam

PKBM yaitu melalui keikutsertaan dalam program, seperti mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta adanya dukungan sosial dan kontribusi sumber daya, yaitu tokoh masyarakat (kepala desa, tokoh agama, adat) membantu sosialisasi PKBM dan masyarakat menyediakan tempat belajar (balai desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dijelaskan bahwa untuk mengajak warga putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan, PKBM secara aktif bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa dan kecamatan, lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja dan masjid, serta lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk memperoleh informasi mengenai anak putus sekolah di wilayah mereka. Selain itu, PKBM juga memanfaatkan kerja sama dengan media atau lembaga pers untuk melakukan sosialisasi mengenai program-program yang diselenggarakan PKBM sehingga masyarakat semakin memahami manfaat pendidikan nonformal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Brithany Cendana Timur, dijelaskan bahwa upaya mengembalikan warga putus sekolah dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa hingga tingkat RT/RW untuk memperoleh data sebaran anak putus sekolah secara akurat. Selain itu, PKBM juga bekerja sama dengan satuan pendidikan formal seperti SMP dan SMA, terutama dalam kondisi tertentu misalnya ketika terdapat siswa hamil atau tidak dapat lagi ditampung di sekolah formal. Dalam situasi tersebut, peserta didik akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal di PKBM agar tetap dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya.

Peran PKBM Menyediakan Fasilitas dan Akses Informasi

Peran PKBM dalam menyediakan fasilitas dan akses informasi merupakan peran yang bersifat pendukung dan fasilitatif (Soerjono Soekanto), yang mengatakan tindakan aktif memungkinkan anak putus sekolah bisa belajar dan lulus. PKBM tidak hanya pasif memiliki gedung, mereka menyebar informasi, meminjamkan modul, dan mencari peserta didik.

Menurut Mustofa Kamil (2009), PKBM tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar tetapi juga sebagai pusat sumber informasi dan bank informasi bagi

masyarakat. Dalam konteks pendidikan nonformal, fasilitas dan akses informasi adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya. PKBM berperan sebagai jembatan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat, khususnya kelompok marginal dan putus sekolah dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Peran ini sangat krusial karena sering kali keterbatasan fasilitas dan informasi menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak dapat beroperasi dalam ruang hampa. Keberhasilan PKBM dalam menarik, mendidik, dan meluluskan anak putus sekolah sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Di Kabupaten Belu, dengan karakteristik sosio-kulturalnya yang unik, pendekatan multi-pihak ini bukan hanya strategis, melainkan suatu keharusan.

Hasil penelitian di lapangan yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi sebagaimana dijelaskan dalam BAB III 3.6 menunjukkan kedua PKBM menjalankan peran sesuai dengan dinamika dan tantangan, di mana PKBM Deflobamora dan PKBM Brithany Cendana Timur memberikan program dan kegiatan yang dirancang untuk masyarakat yang putus sekolah. Kedua PKBM aktif mengumpulkan data dan telaah pustaka, di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa dokumen PKBM seperti laporan kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan sosialisasi yang dilakukan PKBM di desa-desa, maupun dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belu yaitu profil peserta didik dan data anak putus sekolah.

a. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah tulang punggung operasional sebuah PKBM. Meski dengan segala keterbatasan, PKBM dituntut untuk menjadi lembaga yang adaptif dan resourceful. Kemampuan PKBM dalam mengelola, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan menjadi indikator nyata dari profesionalisme dan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat. Sarana dan prasarana yang layak bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang memberdayakan dan memungkinkan terjadinya transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi warga belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Deflobamora Atambua, Bapak Gaspar Kopong Kelen, dijelaskan bahwa dalam mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik, PKBM Deflobamora menyediakan berbagai fasilitas seperti akses internet, perangkat pembelajaran berupa komputer dan laptop, serta sarana pendukung lainnya seperti kursi, meja, infokus, ruang kelas, dan modul pembelajaran.

Lalu dalam akses informasi, PKBM menyediakan internet dengan aplikasi-aplikasi Dapodik yang diunduh dari laman Dapodik Kementerian, serta mengunduh modul-modul pembelajaran dari aplikasi yang disiapkan dan informasi-informasi lain tentang pendidikan nonformal yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belu.

Dalam mendukung pembelajaran dan evaluasi di PKBM Brithany Cendana Timur, PKBM menyediakan sarana prasarana seperti kursi, meja, dan internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM Brithany Cendana Timur, Bapak Leominggus Seran, S.Pd., diketahui bahwa sarana dan prasarana seperti kursi dan meja sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran, namun untuk kegiatan evaluasi berupa ujian kesetaraan, PKBM Brithany masih harus meminjam fasilitas sekolah lain, yaitu SMA Negeri Wedomu, karena ketersediaan komputer atau laptop di PKBM belum mencukupi untuk melaksanakan ujian secara online.

Untuk akses informasinya, sama seperti PKBM Deflobamora Atambua, PKBM Brithany juga menyediakan internet dengan mengunduh aplikasi Dapodik dari laman Dapodik Kementerian serta mengunduh modul-modul pembelajaran dari aplikasi yang disiapkan dan informasi-informasi lain tentang pendidikan nonformal yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belu.

Terbatasnya pelaksanaan PKBM Brithany Cendana Timur dalam menyediakan fasilitas untuk peserta didik karena sarana dan prasarana yang tidak cukup seperti kursi, meja, laptop, dan komputer yang masih kurang untuk melaksanakan ujian memperkuat temuan penelitian terdahulu BAB II 2.1 (Rajaloe et al., 2023; Ais Irmawati, 2017) bahwa keterbatasan sarana merupakan hambatan utama PKBM.

b. Bahan Ajar dan Sumber Belajar

PKBM menyelenggarakan berbagai program, sehingga bahan ajarnya pun berbeda-beda, yaitu:

Program kesetaraan (Paket A, B, C)

Sumber utama: modul kesetaraan Kemendikbudristek yang menyediakan modul digital gratis untuk Paket A, B, dan C yang dapat diunduh di portal Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id) atau situs Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (ditpmpk.kemdikbud.go.id). Modul ini sudah dirancang sesuai kurikulum.

Bahan ajar dukungan:

Video pembelajaran dari platform seperti Rumah Belajar, YouTube Edukasi, dan TikTok.

Program kursus dan pelatihan (keterampilan)

Sumber utama: modul pelatihan sering kali dibuat oleh tutor/pengajar berdasarkan keahlian atau mengacu pada modul dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Balai Latihan Kerja (BLK).

Bahan ajar pendukung:

Bahan baku dan peralatan yang digunakan secara langsung seperti alat untuk mengelas dan komputer.

c. Aksesibilitas Informasi PKBM bagi Masyarakat Melalui Media Sosial, Spanduk, dan Koran

Aksesibilitas informasi merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat—khususnya anak putus sekolah dan keluarganya—untuk memanfaatkan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tanpa akses informasi yang memadai, program dan fasilitasi yang disediakan PKBM tidak akan berarti. Masyarakat harus dapat menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi tentang keberadaan program dan manfaat PKBM dengan mudah.

Di Kabupaten Belu, dengan karakteristik geografis dan sosio-demografis yang unik, menyebarkan informasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang

menggabungkan pendekatan konvensional (luring) dan digital (daring), serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menggabungkan kedekatan sosial melalui tokoh masyarakat dan jaringan komunitas dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna. Dengan strategi multi-saluran ini diharapkan informasi dapat menembus hambatan geografis dan sosial budaya, sehingga setiap warga Belu yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat dengan mudah menemukan jalan kembali belajar dan menggapai masa depannya.

a) Media Sosial

PKBM Deflobamora dan PKBM Bruthany Cendana Timur memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai saluran utama untuk menjangkau peserta didik dan masyarakat urban di sekitar kota Kabupaten Belu. Namun jangkauan sangat terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil dengan sinyal internet yang lemah dan kepemilikan smartphone yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian saya membuktikan bahwa meskipun media sosial adalah alat yang powerful, efektivitasnya sangat bergantung pada infrastruktur di Kabupaten Belu, di mana akses internet belum merata. Strategi ini hanya berhasil menjangkau segmen tertentu seperti di perkotaan. Untuk media sosial, implikasi bagi kelulusan itu sangat baik, di mana peserta didik mendapatkan informasi yang cepat tentang jadwal ujian dan melihat modul belajar via WhatsApp Group, sehingga dapat meningkatkan persiapan peserta didik yang pada akhirnya berkontribusi pada kelulusan. Namun bagi yang tidak terjangkau, mereka tertinggal informasi.

b) Spanduk

Kelebihan utama spanduk adalah aksesibilitas yang universal. Siapa saja yang melewati jalan, terlepas dari status ekonomi atau pendidikan, akan melihatnya. Ini sangat kritis untuk menjangkau orang tua dari anak putus sekolah dan masyarakat yang buta huruf. Pesan singkat dan nomor telepon yang jelas memudahkan untuk tahap action.

Spanduk adalah “Gerbang Pertama” yang mendatangkan calon peserta didik. Tanpa kehadiran spanduk di lokasi strategis, banyak potensi peserta didik yang tidak akan tahu tentang keberadaan PKBM, sehingga peluang untuk lulus bahkan

tidak akan dimulai.

c) Koran

Peran koran bukanlah untuk menjangkau anak putus sekolah secara langsung, tetapi untuk membangun legitimasi dan kepercayaan di mata stakeholder (pemerintah daerah, donatur, tokoh masyarakat). Ketika seorang tokoh masyarakat membaca koran, lalu ia menyampaikan informasi itu kepada warga desanya, terjadi komunikasi multi-level. Namun dampaknya tidak langsung dan sulit diukur.

Implikasi bagi kelulusannya: adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa dapat mempengaruhi partisipasi anak putus sekolah. Mereka bisa mendorong dan memotivasi keluarga untuk mendaftar. Dengan demikian, koran berperan tidak langsung dalam menciptakan lingkungan yang supportive bagi keberlangsungan belajar hingga kelulusan.

d) Memberikan Informasi tentang Ujian dan Pengumuman Pendaftaran dan Kelulusan untuk Peserta Didik

Proses ujian, pendaftaran, dan pengumuman kelulusan merupakan siklus kritis dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses adalah kunci untuk memastikan kelancaran proses ini dan memberikan pengalaman yang baik bagi peserta didik dan orang tua/wali.

Ada beberapa prinsip dasar dalam penyampaian informasi berupa ketepatan terhadap proses yang harus mengikuti regulasi dan standar yang diterapkan oleh pemerintah (seperti POS ujian dari Kemendikbudristek).

Tahapan dan strategi komunikasi yang dilakukan PKBM dalam memberikan informasi tentang ujian dan pengumuman pendaftaran dan kelulusan peserta didik ada beberapa fase yaitu:

a) Fase perencanaan dan pengumuman

Awal di mana PKBM melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua, dan pengumuman bisa melalui grup WhatsApp kelas.

b) Fase pendaftaran

Aktivitas PKBM membuka periode pendaftaran ujian dengan memverifikasi kelengkapan administrasi dan akademik peserta didik, dan setelah itu PKBM memberikan informasi jadwal pendaftaran, cara mendaftar, dokumen yang

diperlukan seperti fotokopi rapor, bukti pelunasan, KTP, dan pas foto.

c) Fase pelaksanaan ujian

Aktivitas PKBM menyiapkan tempat dan melaksanakan ujian sesuai jadwal serta memberikan informasi kepada peserta didik tentang tata tertib ujian yaitu aturan berpakaian, barang yang boleh dibawa, dan larangan untuk mencontek.

d) Fase pengumuman kelulusan

Aktivitas PKBM memastikan semua data telah benar sebelum diumumkan dan mempersiapkan dokumen kelulusan yaitu ijazah dan transkrip nilai. Mengelola informasi ujian dan kelulusan dengan baik adalah bentuk tanggung jawab institusi pendidikan kepada peserta didik. Sistem yang terintegrasi, komunikasi yang proaktif melalui berbagai saluran, serta penerapan prinsip transparansi dan keakuratan akan meminimalisir kecemasan peserta didik dan menciptakan suasana yang kondusif dan terpercaya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKBM berperan sebagai pelaku utama dalam menyediakan akses pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C) melalui kurikulum fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta program tambahan seperti TBM, kursus keterampilan, dan pelatihan. PKBM juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga agama, media, serta memperoleh dukungan dari Dinas Pendidikan dalam aspek pendanaan, fasilitas, dan kebijakan. Selain itu, PKBM menyediakan fasilitas pembelajaran seperti ruang belajar, modul, dan akses internet, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan tutor berkualitas dan sarana prasarana yang belum merata. Tingkat kelulusan peserta didik mencapai 90-100% dalam tiga tahun terakhir, terutama pada paket C, yang didukung oleh strategi pembelajaran fleksibel, pendampingan individu, dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, PKBM masih menghadapi kendala berupa terbatasnya sumber daya manusia, pendanaan, persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan nonformal sebagai pilihan kedua, serta faktor ekonomi dan geografis yang memengaruhi partisipasi peserta didik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A.G. (2021). Statistik Dasar Untuk Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
- Ais Irmawati. (2017). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Mengurangi Buta Aksara di Kabupaten Karimun.
- Andi, Kristanto. (2018). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Ayu Safitri. (2020). Peranan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk Menanamkan Nilai-Nilai Karakter dalam Masyarakat di Desa Bonde, Kec. Palagian, Kab. Polewali Mandar.
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. USA: Pearson Education International.
- Creswell, John W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publication Inc.
- David, Williams. (1995). Lexy Moleong. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Finola, O., Maemunaty, T., Studi, P., Luar, P., Jurusan, S., Pendidikan, I., & Keguruan, F. (n.d.). The Study of Organization PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) in The City of Dumai.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Kamil, Musthofa. (2009). Pendidikan Nonformal: Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Sebuah Pembelajaran dari Jepang). Bandung: Alfabeta.
- Kemdikbudristek. (2025). Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Diambil dari <https://dapodik.kemendikdasmen.go.id/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Permendikbud RI No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI. Jakarta: Kemendikbud.
- Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi: Pokok-Pokok Etnografi II. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kushidayati, L., & Rosyid, M. (2021). Peran Ponpes dan PKBM La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa Cangkring Karanganyar

Demak Jawa Tengah.

- Lina Kushidayati. (2021). Peran Ponpes dan PKBM La Tansa Memfasilitasi Pendidikan Anak Asal Papua di Desa Cangkring Karanganyar Demak Jawa Tengah.
- Miles, Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. (2009). Pendidikan Nonformal. Bandung: Alfabeta.
- Nani I. Rajaloe, Sitirahia Hi Umar, & Saira Yasim. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Membina Peserta Didik yang Putus Sekolah (Studi Kasus di PKBM Mario Laha Kota Ternate Utara).
- Nursalam & Pariani. (2001). Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Ozi Finola, Desti Irja, & Titi Maemunaty. (2017). The Study of Organization PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) in The City of Dumai.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C di PKBM.
- Pola Anto, R., Nikmatullah Nur, Ms., Yusriani, M., Fenni Kurniawati Ardah, M.K., Juwita Desri Ayu, S.P., Adi Nurmahdi, M.K., Baiq Ahda Razula Apriyeni, M., Purwanti, M.S., Narita Yuri Adrianingsih, M., & Miftah Fariz Prima Putra, M.S. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya.
- Rajaloe, N. I., Hi Umar, S., Yasim, S., & Khairun, U. (2023). GeoCivic Journal – Peran PKBM dalam Membina Peserta Didik Putus Sekolah (Studi Kasus di PKBM Mario Laha Kota Ternate Utara), 6(1).
- Riswan Assa, Evelin J.R. Kawung, & Juliana Lumintang. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Sambode, R. A., Tulusana, F., & Londa, V. Y. (n.d.). Peran Pemerintah Daerah dalam Mempromosikan Pariwisata Tanjung Bongo di Desa Soasio Kecamatan Galela

- Induk Kabupaten Halmahera Utara.
- Sihombing, R. (2001). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat: Konsep dan Implementasi.
- Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. (2014). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2009). Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM Press.
- Syamsiati, D. (2019). Sumber Daya Alam dan Nilainya. Cempaka Putih.
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yin, Robert K. (1996). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliartati, A. Firdaus. (2022). Peran PKBM Al-Abrar dalam Memberantas Buta Aksara di Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba.